AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 1, Januari 2024

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Polisi

Syahrial Alas Putra Pagan
Universitas Nurul Hasanah Kutacane, Indonesia
rijalpaganst@yahoo.com

Submitted: 27th Sept 2023 | **Edited**: 26th Dec 2023 | **Issued**: 01st Jan 2024

Cited on: Pagan, S. A. P. (2024). Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Polisi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(1), 132-139.

ABSTRACT

The purpose of the research is to learn about the management and development of management information systems in the police offices. This method is aimed at gaining a deep understanding of the problem rather than making generalizations. Observations, interviews, literature, and questionnaires are some of the methods of gathering data. The conclusion that the author can take after completing the Document Management Information System and Public Service at the City Resort Police Office Tebing High is as follows, facilitating the City resort Police Office in the preparation of reports, public services and facilitates in the search for documents. The proposed system uses a database that helps to organize the data of complaints reports and public services so that the data are integrated together as well as facilitated in the process of search, retrieval of the necessary data. With this application will be able to generate a percentage of crime in the area of the Resort Police Office of Tebing High City according to the number of criminal cases.

Keywords: Management Information Systems, Management Development, Police

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi sekarang ini setiap individu dituntut untuk memiliki kualitas diri yang dapat diandalkan. Dalam penyelesaian suatu masalah tiap individu hendaknya tidak lagi mengandalkan instruksi pemimpin. Setiap individu harus mampu memaksimalkan potensi diri dengan melakukan inovasi dalam menjalankan tugas – tugasnya. Selain kualitas individu, hal yang juga harus diperhatikan betapa pentingnya fasilitas infrastruktur. Fasilitas yang lengkap secara otomatis akan memudahkan individu menyelesaikan tugasnya.

Dalam perkembangan zaman saat ini peranan Teknologi Informasi sudah merupakan halyang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sebuah organisasi modern. Keberhasilan suatuorganisasi dalam mencapai tujuannya selain sangat tergantung pada 4 (empat) macam SumberDaya fisik yang dimiliki suatu organisasi yaitu Manusia,

Material, Mesin dan Uang, sebuah organisasi memerlukan pula Sumber Daya Konseptual yaitu Informasi.

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan (Abdullah & Ita Erliana, 2016).

Dengan demikian, kiat di balik desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dilakukan hampir pada seluruh organisasi maupun Instansi Pemerintahan, tak terkecuali pada lingkup Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dimana setiap waktu sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Polri harus selalu berbenah baik secara Internal maupun Eksternal (Pratiwi et al., 2023).

Polri sebagai salah satu bentuk organisasi yang sedang berkembang dalam menyesuaikan perkembangan zaman pula memerlukan dua bentuk Sumber Daya diatas (Sukamto et al., 2018). Untuk dapat mengelola sumber daya tersebut diatas tentunya Polri dituntut memiliki kewajibannya untuk mengarahkan penggunaan semua sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efektif (Subardin et al., 2024).

Bagi manajemen kepolisian, adanya system informasi yang baik merupakan nilai tambah dalam pengembangan strategi pengawasan dan penegakan hukum (Hamdani et al., 2018). Demikian pula dengan Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan daerah, khususnya Pajak. Dengan pengelolaan pendapatan yang baik melalui Sistem Informasi yang handal, maka sinergi antara kepentingan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan rakyat akan semakin meningkat (Putri et al., 2021).

Untuk memberikan layanan yang baik, cepat dan mengesankan tersebut, baik Kepolisian maupun Pemda melalui Dispenda- nya memerlukan backroom sistem informasi manajemen yang handal. Dengan adanya dukungan sistem informasi yang baik, data kendaraan di suatu wilayah dapat diketahui secara online, sehingga dapat diketahui kendaraan mana yang statusnya kendaraan curian, kecelakaan atau disinyalir melakukan pelanggaran lalu lintas.

Seluruh komponen penyelenggaraan TI yang ada di Polri telah berjalan semenjak dulu, kita mengenal awalnya penggunaan Teknologi Komputer dalam rangka pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) kemudian pada saat ini berkembang penggunaan Teknologi Internet untuk berbagai kepentingan yang disesuaikan dengan tugas pokok Polri yaitu bidang pemeliharaan keamanandan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bidang-bidang dikepolisian dan untuk mengetahui system informasi manajemen yang berlaku di kepolisian. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Di Kantor Polisi

LANDASAN TEORI

Dalam sistem informasi, data dikumpulkan, diubah menjadi informasi, dan diberikan kepada pemakai (Tabrani & Lapelia, 2021). Sistem di dalam suatu organisasi dikenal sebagai sistem informasi. Sistem ini menggabungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian untuk mendukung operasi operasi dan kegiatan strategis, sehingga organisasi dapat memberikan laporan yang diperlukan (Mayangky & Suharyanto, 2018). Sistem informasi dapat berasal dari sistem informasi. Sistem informasi juga dikenal sebagai sistem pengolahan, sistem pengolahan informasi, atau sistem penghasil informasi (Juanita & Dewi, 2019). Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajemen mengelola informasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan perusahaan (Nurdiati et al., 2008).

METODE PENELITIAN

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah daripada membuat generalisasi. Pengamatan atau observasi, wawancara, literratur, dan kuisioner adalah beberapa metode pengumpulan data. Data kualitatif dalam penelitian

ini diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan. Metode ini lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran ini, steiap fenomena sosial dibagi menjadi beberapa bagian masalah, variabel, dan inidikator. Variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol angka positif atau negatif sesuai kategori informasi yang berkaitan dengan variable (Simarmata & Situmorang, 2023).

Teknik perhitungan kuantitaif matematik dapat menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum untuk suatu parameter dengan menggunakan simbol angka plus atau minus. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang suatu masalah sambil memungkinkan generalisasi. Generalisasi adalah ketika suatu masalah benar-benar terjadi dalam dunia nyata dan diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu.

HASIL PENELITIAN

Bidang-bidang di Kantor Polisi

Secara rinci posisi awal dari pelaksanaan tugas Polri, meliputi :

1. Bidang perumusan tugas pokok.

   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 telah memberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan kepada Polri, namun sejauh ini belum ada penataan dan pembagian tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh setiap tingkatan unit organisasi dan satuan kewilayahan Polri. Sehingga dapat terjadi tumpang tindih atau tidak ada yang melaksanakan dan sulitnya mengukur kinerja organisasi.
2. Bidang organisasi.

   Sebagai organisasi publik yang dinamis, maka untuk menjawab perubahan lingkungan dan meningkatnya tuntutan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi Polri secara umum, dan secara khusus melakukan restrukturisasi Detasemen 88/AT, Polair, pembangunan INAFIS, PUSIKNAS, pembentukan Gugus Kendali Mutu dan pembentukan satuan wilayah mengikuti pemekaran wilayah pemerintahan daerah.
3. Bidang operasional.

Meskipun kinerja operasional Polri telah menunjukkan hasil yang baik dan dirasakan oleh masyarakat, namun demikian perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan kinerja bidang operasional yang meliputi :

a. Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar.
b. Pengamanan Pemilu,
c. Penanganan 4 jenis kejahatan yang menjadi prioritas.
d. Pelaksanaan Polmas.

4. Bidang kerjasama / HTCK.

   Masih sering terjadinya miskoordinasi, tumpang tindih, bahkan friksi dan egosektoral antara Polri dengan departemen dan instansi terkait di dalamnegeri, serta perlunya peningkatan dan perluasan kerjasama dengankepolisian / lembaga di luar negeri, memerlukan pembenahan struktur dan instrumen kerjasama dengan lembaga di dalam negeri dan lebih proaktif dalam membangun kerjasama dengan kepolisian / lembaga di luar negeri.

5. Bidang tata kelola logistik.

   Belum tertatanya pendataan logistik yang berkaitan dengan standar minimum kebutuhan logistik yang harus tersedia pada setiap unit organisasi dan setiap tingkatan satuan kewilayahan, disamping itu juga kepatuhan mengenai pengadaanbarang dan jasa di lingkungan Polri, termasuk efektifitas dan efisiensi penggunaan serta perawatannya menjadi sebuah tantangan untuk dilakukan pembenahan sebagai akuntabilitas dalam pengelolaan logistik sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

6. Bidang tata kelola asset.

   Sampai saat ini Polri masih mendapatkan status disclaimer dari BPK karena belum tertibnya pencatatan, keberadaan dan status dari asset Polri, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kondisi ini juga menuntut untuk dilakukan pembenahan tata kelola asset sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Barang Milik Negara (SABMN).

7. Bidang tata kelola anggaran.

   Masalah rendahnya penyerapan anggaran tahun 2008 menunjukkan Polri belum efektif dalam menggunakan anggaran dan juga mengindikasikan belum semua rencana kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya.

8. Bidang manajemen mutu dan kinerja.

   Sampai saat ini Polri belum memiliki sebuah standar penilaian kinerja organisasi dan individu yang obyektif, transparan dan akuntabel yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

9. Bidang sumber daya manusia

   Rendahnya kompetensi terutama lulusan Bintara dan Perwira Pertama Polri, masih banyaknya keluhan tentang penyimpangan dalam penerimaan anggota Polri, serta pembinaan karir yang belum menurut meritokrasi, obyektif, prestasi, moral dan kompetensi, mengharuskan untuk segera dilakukan penyempurnaan proses rekrutmen dan pembenahan dalam pembinaan karir.

10. Bidang remunerasi dan kesejahteraan.

    Harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan anggota Polri secara umum masih jauh dari standar kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu perlu disusun sistem remunerasi yang tepat dan mengusulkan kepada pemerintah sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja sekaligus tingkat kesejahteraan anggota Polri.

11. Pemberdayaan Litbang.

    Pemberdayaan peran Litbang dalam peningkatan kapasitas institusi Polri melalui pengkajian akademik yang komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan Polri secara sinergi guna menghasilkan inovasi-inovasi baru dan terobosan dalampelaksanaan fungsi kepolisian dan pemecahan masalah sosial masyarakatsecara komprehensif dan multidisipliner. Dengan demikian Litbang bukan merupakan unit organisasi tempat anggota yang bermasalah, namun sebagai pusat kajian Polri untuk mewujudkan *center of excellence* kepolisian yang terbaik di kawasan regional.

12. Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

    Terbukanya akses yang luas, kemudahan mendapatkan pelayanan kepolisian, kemudahan memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat, merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas pelayanan dan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi.

Sistem Informasi Manajemen dikantor Polisi

Namun belum dioptimalkan dalam pemakaiannya. Di SPKT Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi telah mempunyai sistem tentang pengarsipan Laporan Kepolisian, tapi dalam pencarian data masih dilakukan secara manual. Dalam pembuatan Aplikasi pengarsipan Laporan Kepolisian menggunakan Borland Delphi dan MySQL. Oleh karena itu dibuat sebuah Aplikasi Pengarsipan Laporan Kepolisian yang baru yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada. Puspita (2012) dalam penelitiannya mengenai Sistem Informasi Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) pada Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi Menggunakan Delphi 2007 dan SQL Server 2008 menyampaikan bahwa pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Pelayanan Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pengolahan data masih direkap di buku besar yang ditulis tangan dan sistem masih menggunakan komputer sebagai sarana pendukung dimana dalam pengolahan datanya telah menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Diharapkan program ini mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Penulis membuat sistem informasi UP3M menggunakan Delphi 2007 dan SQL Server 2008. Penulis menggunakan alat bantu model proses Data Flow Diagram (DFD), model data konseptual dengan Entity Relationship Diagram (ERD), dan bagan alir Flowchart.

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan metode Waterfall untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sistem informasi ini terdiri dari 10 (sepuluh) form yaitu antara lain : form laporan tindak pidana, form jadwal piket, form pelapor, form terlapor, form saksi, form tindak pidana, form penyelidikan, form penyidik, form surat bukti penyidikan, dan form hasil penyidikan. Simpulan yang diperoleh adalah sistem ini dapat membantu dalam mempercepat pembuatan yaitu laporan berkas tindak pidana, laporan penyidik, dan laporan hasil penyidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil penulis setelah menyelesaikan Sistem Informasi Manajemen Dokumen dan Layanan Masyarakat Pada Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut, memudahkan Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi dalam pembuatan laporan, layanan masyarakat dan memudahkan dalam pencarian

dokumen. Sistem yang diusulkan menggunakan database yang membantu mengorganisir data-data laporan pengaduan dan layanan masyarakat sehingga data-data tersebut saling terintegrasi serta memudahkan dalam proses pencarian, pengambilan data-data yang diperlukan. Dengan aplikasi ini akan dapat menghasilkan persentase tindak kriminalitas pada wilayah Kantor Polisi Resort Kota Tebing Tinggi sesuai dengan banyaknya laporan kasus kriminal yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D., & Ita Erliana, C. (2016). Sistem Informasi Pendataan Kendaraan Hilang Berbasis Web Pada Polres Binjai. *Jurnal-Dahlan-UNIMAL-SNIKOM*, 39–46.

Hamdani, M., Primasari, D., & Fajri, H. (2018). Sistem Informasi Manajemen Pengarsipan Bpkb Di Polres Kabupaten Bogor Berbasis Web. *Inova-Tif*, *1*(2), 98. https://doi.org/10.32832/inova-tif.v1i2.5447

Juanita, S., & Dewi, K. (2019). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POS POLISI. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Mayangky, N. A., & Suharyanto, S. (2018). Perancangan Sistem Informasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Pada Polsek Citeureup Cimahi. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, *7*(1), 67–74. https://doi.org/10.32736/sisfokom.v7i1.295

Nurdiati, S., Barus, B., & Prasetyo, D. (2008). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tindak Kejahatan Multilevel berbasis Web. *World Wide Web Internet And Web Information Systems*, 1–12.

Pratiwi, G. A. M. D., Wijaya, P. Y., & Milla Permata Sunny. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Penyidik dalam Menangani Perkara Pada Satuan Reserse …. *… : Jurnal Manajemen …*, *3*(5), 869–881. https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyaamrita/article/view/3675%0Ahttps://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyaamrita/article/download/3675/1929

Putri, N. E., Elizamiharti, E., & Arman, A. (2021). Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *JOSTECH: Journal of Science and Technology*, *1*(1), 20–34. https://doi.org/10.15548/jostech.v1i1.2441

Simarmata, D., & Situmorang, D. M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kota Batam. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, *1*(1), 38–51.

Subardin, Lembayung, E. S., Findryani, & Safal. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat (Sips) Berbasis Web Di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi. *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi*, *3*(1), 17–25.

Sukamto, S., Elfizar, E., & Septiono, M. B. (2018). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kantor Polisi Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *JUITA : Jurnal Informatika*, *5*(2), 65. https://doi.org/10.30595/juita.v5i2.1857

Tabrani, M., & Lapelia, K. (2021). Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu(SPKT) Polsek Karawang Kota. *Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, *10*(1), 15–19.